



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 191 /PMK.07/2012

TENTANG

ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT  
YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012 yang antara lain mengatur alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, penyaluran tahap III Pajak Bumi dan Bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebesar selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari Tahap I sampai dengan Tahap II berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Alokasi definitif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2012 didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan PBB Tahun Anggaran 2012.

R/KA



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan revisi atas alokasi sementara PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.

#### Pasal 2

- (1) Alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp2.913.454.391.723,00 (dua triliun sembilan ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota adalah sebesar Rp1.893.745.354.618,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah); dan
  - b. Alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan adalah sebesar Rp1.019.709.037.105,00 (satu triliun sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima rupiah).
- (2) Rincian alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Penyaluran alokasi definitif PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2/13



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2012

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1197

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 191/PMK.07/2012  
TENTANG  
ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN  
KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN  
ANGGARAN 2012

**RINCIAN ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

dalam rupiah

NO	DAERAH	PBB BAGI RATA	INSENTIF PBB	JUMLAH
<b>I</b>	<b>Provinsi Aceh</b>			
1	Kab. Aceh Barat	3,855,784,618		3,855,784,618
2	Kab. Aceh Besar	3,855,784,618	2,657,279,093	6,513,063,711
3	Kab. Aceh Selatan	3,855,784,618		3,855,784,618
4	Kab. Aceh Singkil	3,855,784,618	1,979,346,677	5,835,131,295
5	Kab. Aceh Tengah	3,855,784,618	1,861,654,574	5,717,439,192
6	Kab. Aceh Tenggara	3,855,784,618		3,855,784,618
7	Kab. Aceh Timur	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Aceh Utara	3,855,784,618	2,576,980,845	6,432,765,463
9	Kab. Bireun	3,855,784,618		3,855,784,618
10	Kab. Pidie	3,855,784,618	2,052,688,086	5,908,472,704
11	Kab. Simeulue	3,855,784,618		3,855,784,618
12	Kota Banda Aceh	3,855,784,618		3,855,784,618
13	Kota Sabang	3,855,784,618		3,855,784,618
14	Kota Langsa	3,855,784,618		3,855,784,618
15	Kota Lhokseumawe	3,855,784,618	1,793,727,008	5,649,511,626
16	Kab. Nagan Raya	3,855,784,618	2,369,834,138	6,225,618,756
17	Kab. Aceh Jaya	3,855,784,618		3,855,784,618
18	Kab. Aceh Barat Daya	3,855,784,618		3,855,784,618
19	Kab. Gayo Lues	3,855,784,618	2,485,726,770	6,341,511,388
20	Kab. Aceh Tamiang	3,855,784,618		3,855,784,618
21	Kab. Bener Meriah	3,855,784,618	2,153,379,470	6,009,164,088
22	Kab. Pidie Jaya	3,855,784,618	2,285,947,062	6,141,731,680
23	Kota Subulussalam	3,855,784,618		3,855,784,618
<b>II</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>			
1	Kab. Asahan	3,855,784,618		3,855,784,618
2	Kab. Dairi	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Deli Serdang	2,815,572,623	4,308,400,051	7,123,972,674
4	Kab. Tanah Karo	3,855,784,618		3,855,784,618
5	Kab. Labuhan Batu	3,855,784,618	2,132,210,332	5,987,994,950
6	Kab. Langkat	3,855,784,618	2,890,813,991	6,746,598,609
7	Kab. Mandailing Natal	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Nias	3,855,784,618		3,855,784,618
9	Kab. Simalungun	3,855,784,618	2,508,333,323	6,364,117,941
10	Kab. Tapanuli Selatan	3,855,784,618	2,015,783,426	5,871,568,044
11	Kab. Tapanuli Tengah	3,855,784,618	2,564,286,038	6,420,070,656
12	Kab. Tapanuli Utara	3,855,784,618	1,841,939,249	5,697,723,867
13	Kab. Toba Samosir	3,855,784,618	1,769,539,815	5,625,324,433
14	Kota Binjai	3,855,784,618	2,165,009,791	6,020,794,409
15	Kota Medan	2,815,572,623	7,033,792,144	9,849,364,767
16	Kota Pematang Siantar	3,855,784,618	1,944,453,402	5,800,238,020
17	Kota Sibolga	3,855,784,618		3,855,784,618
18	Kota Tanjung Balai	3,855,784,618		3,855,784,618
19	Kota Tebing Tinggi	3,855,784,618	2,014,595,777	5,870,380,395
20	Kota Padang Sidempuan	3,855,784,618		3,855,784,618
21	Kab. Pakpak Bharat	3,855,784,618	1,871,124,468	5,726,909,086
22	Kab. Nias Selatan	3,855,784,618	2,624,132,133	6,479,916,751
23	Kab. Humbang Hasundutan	3,855,784,618	2,409,597,322	6,265,381,940
24	Kab. Serdang Bedagai	3,855,784,618	2,064,474,677	5,920,259,295
25	Kab. Samosir	3,855,784,618	1,891,311,335	5,747,095,953
26	Kab. Batubara	3,855,784,618		3,855,784,618
27	Kab. Padang Lawas Utara	3,855,784,618		3,855,784,618
28	Kab. Padang Lawas	3,855,784,618	1,787,792,487	5,643,577,105

2/11



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2

NO	DAERAH	PBB BAGI RATA	INSENTIF PBB	JUMLAH
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	3,855,784,618		3,855,784,618
30	Kab. Labuhan Batu Utara	3,855,784,618	1,866,260,074	5,722,044,692
31	Kab. Nias Utara	3,855,784,618	2,450,732,859	6,306,517,477
32	Kab. Nias Barat	3,855,784,618	2,554,354,560	6,410,139,178
33	Kota Gunungsitoli	3,855,784,618	2,544,213,945	6,399,998,563
<b>III</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>			
1	Kab. Limapuluh Kota	3,855,784,618	1,865,771,745	5,721,556,363
2	Kab. Agam	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Kepulauan Mentawai	3,855,784,618	2,733,528,113	6,589,312,731
4	Kab. Padang Pariaman	3,855,784,618	2,052,338,220	5,908,122,838
5	Kab. Pasaman	3,855,784,618	2,532,573,016	6,388,357,634
6	Kab. Pesisir Selatan	3,855,784,618		3,855,784,618
7	Kab. Sijunjung	3,855,784,618	2,088,624,844	5,944,409,462
8	Kab. Solok	3,855,784,618		3,855,784,618
9	Kab. Tanah Datar	3,855,784,618		3,855,784,618
10	Kota Bukit Tinggi	3,855,784,618	1,974,562,411	5,830,347,029
11	Kota Padang Panjang	3,855,784,618	2,209,613,711	6,065,398,329
12	Kota Padang	3,855,784,618	2,501,252,424	6,357,037,042
13	Kota Payakumbuh	3,855,784,618	1,881,138,527	5,736,923,145
14	Kota Sawahlunto	3,855,784,618	1,616,576,195	5,472,360,813
15	Kota Solok	3,855,784,618	1,654,465,866	5,510,250,484
16	Kota Pariaman	3,855,784,618	2,118,341,671	5,974,126,289
17	Kab. Pasaman Barat	3,855,784,618		3,855,784,618
18	Kab. Dharmasraya	3,855,784,618		3,855,784,618
19	Kab. Solok Selatan	3,855,784,618		3,855,784,618
<b>IV</b>	<b>Provinsi Riau</b>			
1	Kab. Bengkalis	3,855,784,618	2,139,453,730	5,995,238,348
2	Kab. Indragiri Hilir	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Indragiri Hulu	3,855,784,618	2,751,180,894	6,606,965,512
4	Kab. Kampar	3,855,784,618	3,052,530,449	6,908,315,067
5	Kab. Kuantan Singingi	3,855,784,618	2,120,206,331	5,975,990,949
6	Kab. Pelalawan	3,855,784,618	3,246,963,086	7,102,747,704
7	Kab. Rokan Hilir	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Rokan Hulu	3,855,784,618	2,839,468,541	6,695,253,159
9	Kab. Siak	3,855,784,618	2,940,677,395	6,796,462,013
10	Kota Dumai	3,855,784,618	2,274,018,561	6,129,803,179
11	Kota Pekanbaru	2,815,572,623	2,279,880,051	5,095,452,674
12	Kab. Kepulauan Meranti	3,855,784,618		3,855,784,618
<b>V</b>	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>			
1	Kab. Bintan	3,855,784,618	2,155,369,632	6,011,154,250
2	Kab. Natuna	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Karimun	3,855,784,618		3,855,784,618
4	Kota Batam	3,855,784,618	3,828,773,594	7,684,558,212
5	Kota Tanjung Pinang	3,855,784,618		3,855,784,618
6	Kab. Lingga	3,855,784,618	2,226,766,210	6,082,550,828
7	Kab. Kepulauan Anambas	3,855,784,618		3,855,784,618
<b>VI</b>	<b>Provinsi Jambi</b>			
1	Kab. Batanghari	3,855,784,618	1,972,464,663	5,828,249,281
2	Kab. Bungo	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Kerinci	3,855,784,618		3,855,784,618
4	Kab. Merangin	3,855,784,618		3,855,784,618
5	Kab. Muaro Jambi	3,855,784,618		3,855,784,618
6	Kab. Sarolangun	3,855,784,618		3,855,784,618
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	3,855,784,618	2,129,171,063	5,984,955,681
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	3,855,784,618	2,665,146,558	6,520,931,176
9	Kab. Tebo	3,855,784,618		3,855,784,618
10	Kota Jambi	3,855,784,618		3,855,784,618
11	Kota Sungai Penuh	3,855,784,618	1,436,607,837	5,292,392,455

6/5



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3

NO	DAERAH	PBB BAGI RATA	INSENTIF PBB	JUMLAH
<b>VII</b>	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>			
1	Kab. Lahat	3,855,784,618	2,168,381,042	6,024,165,660
2	Kab. Musi Banyuasin	3,855,784,618	2,830,279,201	6,686,063,819
3	Kab. Musi Rawas	3,855,784,618	3,189,409,578	7,045,194,196
4	Kab. Muara Enim	3,855,784,618	3,123,191,275	6,978,975,893
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3,855,784,618	3,672,240,474	7,528,025,092
6	Kab. Ogan Komering Ulu	3,855,784,618	2,181,767,455	6,037,552,073
7	Kota Palembang	2,815,572,623	2,617,455,234	5,433,027,857
8	Kota Pagar Alam	3,855,784,618		3,855,784,618
9	Kota Lubuk Linggau	3,855,784,618	1,869,247,644	5,725,032,262
10	Kota Prabumulih	3,855,784,618		3,855,784,618
11	Kab. Banyuasin	3,855,784,618	3,085,336,434	6,941,121,052
12	Kab. Ogan Ilir	3,855,784,618	2,566,709,043	6,422,493,661
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3,855,784,618	2,752,566,037	6,608,350,655
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3,855,784,618	2,098,663,175	5,954,447,793
15	Kab. Empat Lawang	3,855,784,618	2,016,168,132	5,871,952,750
<b>VIII</b>	<b>Provinsi Bangka Belitung</b>			
1	Kab. Bangka	3,855,784,618	2,170,471,310	6,026,255,928
2	Kab. Belitung	3,855,784,618	2,284,294,525	6,140,079,143
3	Kota Pangkal Pinang	3,855,784,618		3,855,784,618
4	Kab. Bangka Selatan	3,855,784,618	2,329,113,237	6,184,897,855
5	Kab. Bangka Tengah	3,855,784,618	1,793,090,894	5,648,875,512
6	Kab. Bangka Barat	3,855,784,618		3,855,784,618
7	Kab. Belitung Timur	3,855,784,618	2,022,658,229	5,878,442,847
<b>IX</b>	<b>Provinsi Bengkulu</b>			
1	Kab. Bengkulu Selatan	3,855,784,618	1,954,445,957	5,810,230,575
2	Kab. Bengkulu Utara	3,855,784,618	1,906,262,328	5,762,046,946
3	Kab. Rejang Lebong	3,855,784,618	2,341,097,593	6,196,882,211
4	Kota Bengkulu	3,855,784,618	1,754,647,716	5,610,432,334
5	Kab. Kaur	3,855,784,618	2,452,116,222	6,307,900,840
6	Kab. Seluma	3,855,784,618	2,279,653,123	6,135,437,741
7	Kab. Mukomuko	3,855,784,618	1,741,436,595	5,597,221,213
8	Kab. Lebong	3,855,784,618	2,033,546,022	5,889,330,640
9	Kab. Kepahiang	3,855,784,618	2,056,099,792	5,911,884,410
10	Kab. Bengkulu Tengah	3,855,784,618		3,855,784,618
<b>X</b>	<b>Provinsi Lampung</b>			
1	Kab. Lampung Barat	3,855,784,618	2,773,572,390	6,629,357,008
2	Kab. Lampung Selatan	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Lampung Tengah	3,855,784,618		3,855,784,618
4	Kab. Lampung Utara	3,855,784,618	2,248,030,807	6,103,815,425
5	Kab. Lampung Timur	3,855,784,618	2,506,008,210	6,361,792,828
6	Kab. Tanggamus	3,855,784,618		3,855,784,618
7	Kab. Tulang Bawang	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Way Kanan	3,855,784,618	2,783,402,634	6,639,187,252
9	Kota Bandar Lampung	2,815,572,623	1,854,515,695	4,670,088,318
10	Kota Metro	3,855,784,618		3,855,784,618
11	Kab. Pesawaran	3,855,784,618		3,855,784,618
12	Kab. Pringsewu	3,855,784,618		3,855,784,618
13	Kab. Mesuji	3,855,784,618	2,366,929,536	6,222,714,154
14	Kab. Tulang Bawang Barat	3,855,784,618	2,311,175,004	6,166,959,622
<b>XI</b>	<b>Provinsi DKI Jakarta</b>	19,278,923,090	89,113,591,914	108,392,515,004
<b>XII</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
1	Kab. Bandung	3,855,784,618	4,486,937,733	8,342,722,351
2	Kab. Bekasi	3,855,784,618	6,986,967,002	10,842,751,620
3	Kab. Bogor	2,815,572,623	5,447,938,824	8,263,511,447
4	Kab. Ciamis	3,855,784,618	3,722,357,745	7,578,142,363
5	Kab. Cianjur	3,855,784,618	3,441,586,894	7,297,371,512
6	Kab. Cirebon	3,855,784,618	3,027,644,541	6,883,429,159

h  
h



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

NO	DAERAH	PBB BAGI RATA	INSENTIF PBB	JUMLAH
7	Kab. Garut	3,855,784,618	3,737,233,825	7,593,018,443
8	Kab. Indramayu	3,855,784,618	2,667,674,284	6,523,458,902
9	Kab. Karawang	3,855,784,618	3,886,482,700	7,742,267,318
10	Kab. Kuningan	3,855,784,618	2,566,140,017	6,421,924,635
11	Kab. Majalengka	3,855,784,618	2,794,357,101	6,650,141,719
12	Kab. Purwakarta	3,855,784,618	2,652,478,889	6,508,263,507
13	Kab. Subang	3,855,784,618	2,838,776,867	6,694,561,485
14	Kab. Sukabumi	3,855,784,618	3,136,084,647	6,991,869,265
15	Kab. Sumedang	3,855,784,618	3,244,906,439	7,100,691,057
16	Kab. Tasikmalaya	3,855,784,618	3,610,192,058	7,465,976,676
17	Kota Bandung	3,855,784,618		3,855,784,618
18	Kota Bekasi	3,855,784,618	5,511,377,612	9,367,162,230
19	Kota Bogor	3,855,784,618	3,799,374,390	7,655,159,008
20	Kota Cirebon	3,855,784,618	2,040,426,880	5,896,211,498
21	Kota Depok	2,815,572,623	2,472,352,211	5,287,924,834
22	Kota Sukabumi	3,855,784,618		3,855,784,618
23	Kota Cimahi	3,855,784,618		3,855,784,618
24	Kota Tasikmalaya	3,855,784,618		3,855,784,618
25	Kota Banjar	3,855,784,618	1,953,678,705	5,809,463,323
26	Kab. Bandung Barat	3,855,784,618	3,447,852,255	7,303,636,873
<b>XIII</b>	<b>Provinsi Banten</b>			
1	Kab. Lebak	3,855,784,618	2,976,799,906	6,832,584,524
2	Kab. Pandeglang	3,855,784,618	3,024,667,829	6,880,452,447
3	Kab. Serang	3,855,784,618	4,520,493,566	8,376,278,184
4	Kab. Tangerang	3,855,784,618	10,277,859,673	14,133,644,291
5	Kota Cilegon	3,855,784,618	3,524,749,562	7,380,534,180
6	Kota Tangerang	3,855,784,618	9,547,840,251	13,403,624,869
7	Kota Serang	3,855,784,618	2,387,052,208	6,242,836,826
8	Kota Tangerang Selatan	3,855,784,618	7,836,382,089	11,692,166,707
<b>XIV</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
1	Kab. Banjarnegara	3,855,784,618	2,945,203,441	6,800,988,059
2	Kab. Banyumas	3,855,784,618	3,618,238,097	7,474,022,715
3	Kab. Batang	3,855,784,618	2,893,810,244	6,749,594,862
4	Kab. Blora	3,855,784,618	2,299,313,583	6,155,098,201
5	Kab. Boyolali	3,855,784,618	3,027,915,756	6,883,700,374
6	Kab. Brebes	3,855,784,618	3,836,064,947	7,691,849,565
7	Kab. Cilacap	3,855,784,618	4,041,150,722	7,896,935,340
8	Kab. Demak	3,855,784,618	2,746,207,097	6,601,991,715
9	Kab. Grobogan	3,855,784,618	2,925,860,991	6,781,645,609
10	Kab. Jepara	3,855,784,618	2,735,055,370	6,590,839,988
11	Kab. Karanganyar	3,855,784,618	2,932,814,508	6,788,599,126
12	Kab. Kebumen	3,855,784,618	3,413,637,355	7,269,421,973
13	Kab. Kendal	3,855,784,618	2,804,251,091	6,660,035,709
14	Kab. Klaten	3,855,784,618	2,990,105,626	6,845,890,244
15	Kab. Kudus	3,855,784,618	2,664,106,137	6,519,890,755
16	Kab. Magelang	3,855,784,618	3,344,533,209	7,200,317,827
17	Kab. Pati	3,855,784,618	2,651,477,809	6,507,262,427
18	Kab. Pekalongan	3,855,784,618	2,326,141,611	6,181,926,229
19	Kab. Pemasang	3,855,784,618	2,555,756,408	6,411,541,026
20	Kab. Purbalingga	3,855,784,618	2,977,450,099	6,833,234,717
21	Kab. Purworejo	3,855,784,618	3,130,882,656	6,986,667,274
22	Kab. Rembang	3,855,784,618	2,789,694,051	6,645,478,669
23	Kab. Semarang	3,855,784,618		3,855,784,618
24	Kab. Sragen	3,855,784,618	3,021,673,129	6,877,457,747
25	Kab. Sukoharjo	2,815,572,623	1,781,470,310	4,597,042,933
26	Kab. Tegal	3,855,784,618	2,477,249,403	6,333,034,021
27	Kab. Temanggung	3,855,784,618	2,937,844,129	6,793,628,747
28	Kab. Wonogiri	3,855,784,618	2,909,936,795	6,765,721,413

12





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5

NO	DAERAH	PBB BAGI RATA	INSENTIF PBB	JUMLAH
29	Kab. Wonosobo	3,855,784,618	3,056,634,995	6,912,419,613
30	Kota Magelang	3,855,784,618	1,936,374,462	5,792,159,080
31	Kota Pekalongan	3,855,784,618		3,855,784,618
32	Kota Salatiga	3,855,784,618	1,760,173,636	5,615,958,254
33	Kota Semarang	2,815,572,623	3,429,431,203	6,245,003,826
34	Kota Surakarta	3,855,784,618	4,276,368,419	8,132,153,037
35	Kota Tegal	3,855,784,618		3,855,784,618
<b>XV</b>	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
1	Kab. Bantul	3,855,784,618	2,306,867,998	6,162,652,616
2	Kab. Gunung Kidul	3,855,784,618	2,990,728,194	6,846,512,812
3	Kab. Kulon Progo	3,855,784,618	2,806,737,577	6,662,522,195
4	Kab. Sleman	3,855,784,618	3,355,449,433	7,211,234,051
5	Kota Yogyakarta	2,815,572,623	1,808,411,763	4,623,984,386
<b>XVI</b>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Kab. Bangkalan	3,855,784,618	2,337,711,809	6,193,496,427
2	Kab. Banyuwangi	3,855,784,618	2,960,781,450	6,816,566,068
3	Kab. Blitar	3,855,784,618	2,596,965,232	6,452,749,850
4	Kab. Bojonegoro	3,855,784,618	3,865,089,399	7,720,874,017
5	Kab. Bondowoso	3,855,784,618		3,855,784,618
6	Kab. Gresik	2,815,572,623	2,615,872,617	5,431,445,240
7	Kab. Jember	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Jombang	3,855,784,618	3,678,602,828	7,534,387,446
9	Kab. Kediri	3,855,784,618	4,580,927,449	8,436,712,067
10	Kab. Lamongan	3,855,784,618	3,593,907,953	7,449,692,571
11	Kab. Lumajang	3,855,784,618		3,855,784,618
12	Kab. Madiun	3,855,784,618	2,844,900,797	6,700,685,415
13	Kab. Magetan	3,855,784,618	2,892,101,600	6,747,886,218
14	Kab. Malang	3,855,784,618	4,818,735,433	8,674,520,051
15	Kab. Mojokerto	3,855,784,618	3,340,786,214	7,196,570,832
16	Kab. Nganjuk	3,855,784,618	3,696,492,088	7,552,276,706
17	Kab. Ngawi	3,855,784,618	3,020,367,881	6,876,152,499
18	Kab. Pacitan	3,855,784,618	2,894,836,881	6,750,621,499
19	Kab. Pamekasan	3,855,784,618	2,809,350,845	6,665,135,463
20	Kab. Pasuruan	3,855,784,618	4,202,162,351	8,057,946,969
21	Kab. Ponorogo	3,855,784,618	3,062,460,008	6,918,244,626
22	Kab. Probolinggo	3,855,784,618	2,494,661,223	6,350,445,841
23	Kab. Sampang	3,855,784,618	2,731,245,687	6,587,030,305
24	Kab. Sidoarjo	2,815,572,623	3,449,924,462	6,265,497,085
25	Kab. Situbondo	3,855,784,618		3,855,784,618
26	Kab. Sumenep	3,855,784,618	2,995,279,231	6,851,063,849
27	Kab. Trenggalek	3,855,784,618		3,855,784,618
28	Kab. Tuban	3,855,784,618	3,137,227,751	6,993,012,369
29	Kab. Tulungagung	3,855,784,618	3,698,737,749	7,554,522,367
30	Kota Blitar	3,855,784,618	1,751,050,520	5,606,835,138
31	Kota Kediri	3,855,784,618	2,034,823,206	5,890,607,824
32	Kota Madiun	3,855,784,618	2,556,068,500	6,411,853,118
33	Kota Malang	3,855,784,618	2,476,795,977	6,332,580,595
34	Kota Mojokerto	3,855,784,618	1,902,564,709	5,758,349,327
35	Kota Pasuruan	3,855,784,618		3,855,784,618
36	Kota Probolinggo	3,855,784,618		3,855,784,618
37	Kota Surabaya	2,815,572,623		2,815,572,623
38	Kota Batu	3,855,784,618		3,855,784,618
<b>XVII</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>			
1	Kab. Bengkayang	3,855,784,618		3,855,784,618
2	Kab. Landak	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Kapuas Hulu	3,855,784,618	3,608,542,476	7,464,327,094
4	Kab. Ketapang	3,855,784,618	4,187,770,091	8,043,554,709
5	Kab. Pontianak	3,855,784,618		3,855,784,618



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6

NO	DAERAH	PBB BAGI RATA	INSENTIF PBB	JUMLAH
6	Kab. Sambas	3,855,784,618		3,855,784,618
7	Kab. Sanggau	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Sintang	3,855,784,618	3,601,254,125	7,457,038,743
9	Kota Pontianak	2,815,572,623	2,039,123,261	4,854,695,884
10	Kota Singkawang	3,855,784,618	2,032,383,468	5,888,168,086
11	Kab. Sekadau	3,855,784,618	2,569,233,238	6,425,017,856
12	Kab. Melawi	3,855,784,618	2,227,807,171	6,083,591,789
13	Kab. Kayong Utara	3,855,784,618		3,855,784,618
14	Kab. Kubu Raya	3,855,784,618	2,784,798,096	6,640,582,714
<b>XVIII</b>	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>			
1	Kab. Barito Selatan	3,855,784,618	2,363,903,644	6,219,688,262
2	Kab. Barito Utara	3,855,784,618	2,455,015,173	6,310,799,791
3	Kab. Kapuas	3,855,784,618		3,855,784,618
4	Kab. Kotawaringin Barat	3,855,784,618	2,959,135,027	6,814,919,645
5	Kab. Kotawaringin Timur	3,855,784,618	3,067,269,586	6,923,054,204
6	Kota Palangkaraya	3,855,784,618	2,346,966,844	6,202,751,462
7	Kab. Barito Timur	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Murung Raya	3,855,784,618	3,477,961,460	7,333,746,078
9	Kab. Pulang Pisau	3,855,784,618		3,855,784,618
10	Kab. Gunung Mas	3,855,784,618	2,826,004,623	6,681,789,241
11	Kab. Lamandau	3,855,784,618	2,534,034,557	6,389,819,175
12	Kab. Sukamara	3,855,784,618	2,412,979,105	6,268,763,723
13	Kab. Katingan	3,855,784,618	3,077,742,191	6,933,526,809
14	Kab. Seruyan	3,855,784,618	2,674,823,952	6,530,608,570
<b>XIX</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>			
1	Kab. Banjar	3,855,784,618	2,347,343,603	6,203,128,221
2	Kab. Barito Kuala	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	3,855,784,618	2,387,857,533	6,243,642,151
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	3,855,784,618		3,855,784,618
5	Kab. Hulu Sungai Utara	3,855,784,618	2,232,239,506	6,088,024,124
6	Kab. Kotabaru	3,855,784,618		3,855,784,618
7	Kab. Tabalong	3,855,784,618	2,310,822,280	6,166,606,898
8	Kab. Tanah Laut	3,855,784,618		3,855,784,618
9	Kab. Tapin	3,855,784,618		3,855,784,618
10	Kota Banjarbaru	3,855,784,618	2,500,727,829	6,356,512,447
11	Kota Banjarmasin	3,855,784,618		3,855,784,618
12	Kab. Balangan	3,855,784,618	2,042,304,065	5,898,088,683
13	Kab. Tanah Bumbu	3,855,784,618	2,267,619,802	6,123,404,420
<b>XX</b>	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>			
1	Kab. Berau	3,855,784,618		3,855,784,618
2	Kab. Bulungan	3,855,784,618	3,028,671,908	6,884,456,526
3	Kab. Kutai Kartanegara	3,855,784,618		3,855,784,618
4	Kab. Kutai Barat	3,855,784,618	4,259,625,260	8,115,409,878
5	Kab. Kutai Timur	3,855,784,618	3,963,246,172	7,819,030,790
6	Kab. Malinau	3,855,784,618	3,970,145,551	7,825,930,169
7	Kab. Nunukan	3,855,784,618	2,995,009,807	6,850,794,425
8	Kab. Paser	3,855,784,618		3,855,784,618
9	Kota Balikpapan	2,815,572,623		2,815,572,623
10	Kota Bontang	3,855,784,618	1,870,317,383	5,726,102,001
11	Kota Samarinda	2,815,572,623		2,815,572,623
12	Kota Tarakan	3,855,784,618	2,549,811,755	6,405,596,373
13	Kab. Penajam Paser Utara	3,855,784,618	2,497,061,971	6,352,846,589
14	Kab. Tana Tidung	3,855,784,618		3,855,784,618
<b>XXI</b>	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>			
1	Kab. Bolaang Mongondow	3,855,784,618	2,353,757,521	6,209,542,139
2	Kab. Minahasa	3,855,784,618	1,761,261,879	5,617,046,497
3	Kab. Sangihe	3,855,784,618	2,360,998,108	6,216,782,726
4	Kota Bitung	3,855,784,618	3,333,558,026	7,189,342,644

R  
K



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

NO	DAERAH	PBB BAGI RATA	INSENTIF PBB	JUMLAH
5	Kota Manado	3,855,784,618		3,855,784,618
6	Kab. Kepulauan Talaud	3,855,784,618	2,174,053,942	6,029,838,560
7	Kab. Minahasa Selatan	3,855,784,618	2,337,421,311	6,193,205,929
8	Kota Tomohon	3,855,784,618	2,112,197,758	5,967,982,376
9	Kab. Minahasa Utara	3,855,784,618	2,057,755,649	5,913,540,267
10	Kota Kotamobagu	3,855,784,618		3,855,784,618
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3,855,784,618	2,329,427,770	6,185,212,388
12	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	3,855,784,618	2,300,124,914	6,155,909,532
13	Kab. Minahasa Tenggara	3,855,784,618	2,356,928,545	6,212,713,163
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3,855,784,618	2,208,575,285	6,064,359,903
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3,855,784,618	2,465,966,774	6,321,751,392
<b>XXII</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>			
1	Kab. Boalemo	3,855,784,618	2,530,662,708	6,386,447,326
2	Kab. Gorontalo	3,855,784,618	2,121,795,730	5,977,580,348
3	Kota Gorontalo	2,815,572,623	1,511,894,926	4,327,467,549
4	Kab. Pohuwato	3,855,784,618	2,539,078,071	6,394,862,689
5	Kab. Bone Bolango	3,855,784,618	2,420,116,941	6,275,901,559
6	Kab. Gorontalo Utara	3,855,784,618	2,484,992,801	6,340,777,419
<b>XXIII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>			
1	Kab. Banggai	3,855,784,618	2,440,428,028	6,296,212,646
2	Kab. Banggai Kepulauan	3,855,784,618	2,615,224,174	6,471,008,792
3	Kab. Buol	3,855,784,618		3,855,784,618
4	Kab. Tolitoli	3,855,784,618		3,855,784,618
5	Kab. Donggala	3,855,784,618		3,855,784,618
6	Kab. Morowali	3,855,784,618	3,030,540,913	6,886,325,531
7	Kab. Poso	3,855,784,618	2,862,363,176	6,718,147,794
8	Kota Palu	2,815,572,623		2,815,572,623
9	Kab. Parigi Moutong	3,855,784,618	2,810,175,694	6,665,960,312
10	Kab. Tojo Una Una	3,855,784,618	2,641,860,589	6,497,645,207
11	Kab. Sigi	3,855,784,618		3,855,784,618
<b>XXIV</b>	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>			
1	Kab. Bantaeng	3,855,784,618	1,966,069,695	5,821,854,313
2	Kab. Barru	3,855,784,618	2,281,677,879	6,137,462,497
3	Kab. Bone	3,855,784,618	3,416,999,244	7,272,783,862
4	Kab. Bulukumba	3,855,784,618	2,058,007,469	5,913,792,087
5	Kab. Enrekang	3,855,784,618	2,499,268,478	6,355,053,096
6	Kab. Gowa	3,855,784,618	2,639,454,158	6,495,238,776
7	Kab. Jeneponto	3,855,784,618	2,171,596,060	6,027,380,678
8	Kab. Luwu	3,855,784,618	2,216,041,955	6,071,826,573
9	Kab. Luwu Utara	3,855,784,618	2,944,493,626	6,800,278,244
10	Kab. Maros	3,855,784,618	2,826,054,235	6,681,838,853
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	3,855,784,618	2,049,135,899	5,904,920,517
12	Kab. Pinrang	3,855,784,618	1,980,960,696	5,836,745,314
13	Kab. Kepulauan Selayar	3,855,784,618	1,998,924,597	5,854,709,215
14	Kab. Sidenreng Rappang	3,855,784,618	2,168,135,620	6,023,920,238
15	Kab. Sinjai	3,855,784,618	2,076,820,275	5,932,604,893
16	Kab. Soppeng	3,855,784,618	2,481,434,635	6,337,219,253
17	Kab. Takalar	3,855,784,618	1,835,603,514	5,691,388,132
18	Kab. Tana Toraja	3,855,784,618	2,507,400,630	6,363,185,248
19	Kab. Wajo	3,855,784,618	2,686,047,923	6,541,832,541
20	Kota Parepare	3,855,784,618	2,381,509,828	6,237,294,446
21	Kota Makassar	3,855,784,618	5,471,909,235	9,327,693,853
22	Kota Palopo	3,855,784,618	1,690,420,791	5,546,205,409
23	Kab. Luwu Timur	3,855,784,618	2,703,327,776	6,559,112,394
24	Kab. Toraja Utara	3,855,784,618	2,515,966,377	6,371,750,995
<b>XXV</b>	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>			
1	Kab. Majene	3,855,784,618	2,460,104,308	6,315,888,926
2	Kab. Mamuju	3,855,784,618	2,045,875,321	5,901,659,939



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8

NO	DAERAH	PBB BAGI RATA	INSENTIF PBB	JUMLAH
3	Kab. Polewali Mandar	3,855,784,618	2,032,947,167	5,888,731,785
4	Kab. Mamasa	3,855,784,618	2,370,521,711	6,226,306,329
5	Kab. Mamuju Utara	3,855,784,618	2,429,602,755	6,285,387,373
<b>XXVI</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>			
1	Kab. Buton	3,855,784,618	2,193,261,909	6,049,046,527
2	Kab. Konawe	3,855,784,618	2,734,479,290	6,590,263,908
3	Kab. Kolaka	3,855,784,618	2,824,886,352	6,680,670,970
4	Kab. Muna	3,855,784,618	2,607,628,881	6,463,413,499
5	Kota Kendari	3,855,784,618	2,359,256,687	6,215,041,305
6	Kota Baubau	3,855,784,618	1,860,012,902	5,715,797,520
7	Kab. Konawe Selatan	3,855,784,618	2,722,143,708	6,577,928,326
8	Kab. Bombana	3,855,784,618	2,123,126,546	5,978,911,164
9	Kab. Wakatobi	3,855,784,618	1,753,568,614	5,609,353,232
10	Kab. Kolaka Utara	3,855,784,618	2,517,698,985	6,373,483,603
11	Kab. Konawe Utara	3,855,784,618	2,226,552,573	6,082,337,191
12	Kab. Buton Utara	3,855,784,618	2,355,065,774	6,210,850,392
<b>XXVII</b>	<b>Provinsi Bali</b>			
1	Kab. Badung	3,855,784,618	6,288,653,635	10,144,438,253
2	Kab. Bangli	3,855,784,618	2,049,957,583	5,905,742,201
3	Kab. Buleleng	3,855,784,618	2,764,962,168	6,620,746,786
4	Kab. Gianyar	3,855,784,618	2,441,319,861	6,297,104,479
5	Kab. Jembrana	3,855,784,618	1,759,088,421	5,614,873,039
6	Kab. Karangasem	3,855,784,618	2,251,327,797	6,107,112,415
7	Kab. Klungkung	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Tabanan	3,855,784,618	2,478,312,336	6,334,096,954
9	Kota Denpasar	3,855,784,618	4,566,586,782	8,422,371,400
<b>XXVIII</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>			
1	Kab. Bima	3,855,784,618	2,286,656,553	6,142,441,171
2	Kab. Dompu	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Lombok Barat	3,855,784,618	2,627,112,405	6,482,897,023
4	Kab. Lombok Tengah	3,855,784,618	2,264,834,593	6,120,619,211
5	Kab. Lombok Timur	3,855,784,618	2,972,653,280	6,828,437,898
6	Kab. Sumbawa	3,855,784,618		3,855,784,618
7	Kota Mataram	3,855,784,618	2,003,372,737	5,859,157,355
8	Kota Bima	3,855,784,618		3,855,784,618
9	Kab. Sumbawa Barat	3,855,784,618		3,855,784,618
10	Kab. Lombok Utara	3,855,784,618	2,608,067,285	6,463,851,903
<b>XXIX</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>			
1	Kab. Alor	3,855,784,618		3,855,784,618
2	Kab. Belu	3,855,784,618	2,015,400,811	5,871,185,429
3	Kab. Ende	3,855,784,618		3,855,784,618
4	Kab. Flores Timur	3,855,784,618	1,897,406,138	5,753,190,756
5	Kab. Kupang	3,855,784,618	2,756,844,371	6,612,628,989
6	Kab. Lembata	3,855,784,618	1,994,023,011	5,849,807,629
7	Kab. Manggarai	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Ngada	3,855,784,618	2,041,708,096	5,897,492,714
9	Kab. Sikka	3,855,784,618		3,855,784,618
10	Kab. Sumba Barat	3,855,784,618	2,060,251,130	5,916,035,748
11	Kab. Sumba Timur	3,855,784,618	2,884,044,100	6,739,828,718
12	Kab. Timor Tengah Selatan	3,855,784,618	2,329,501,231	6,185,285,849
13	Kab. Timor Tengah Utara	3,855,784,618		3,855,784,618
14	Kota Kupang	3,855,784,618		3,855,784,618
15	Kab. Rote Ndao	3,855,784,618	2,143,096,569	5,998,881,187
16	Kab. Manggarai Barat	3,855,784,618	2,729,018,731	6,584,803,349
17	Kab. Nagekeo	3,855,784,618	1,778,231,141	5,634,015,759
18	Kab. Sumba Barat Daya	3,855,784,618	2,143,582,225	5,999,366,843
19	Kab. Sumba Tengah	3,855,784,618		3,855,784,618
20	Kab. Manggarai Timur	3,855,784,618		3,855,784,618

62



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9

NO	DAERAH	PBB BAGI RATA	INSENTIF PBB	JUMLAH
21	Kab. Sabu Raijua	3,855,784,618		3,855,784,618
<b>XXX</b>	<b>Provinsi Maluku</b>			
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	3,855,784,618	2,115,157,351	5,970,941,969
2	Kab. Maluku Tengah	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Maluku Tenggara	3,855,784,618	2,081,364,731	5,937,149,349
4	Kab. Pulau Buru	3,855,784,618		3,855,784,618
5	Kota Ambon	3,855,784,618	1,979,545,884	5,835,330,502
6	Kab. Seram Bagian Barat	3,855,784,618		3,855,784,618
7	Kab. Seram Bagian Timur	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Kepulauan Aru	3,855,784,618		3,855,784,618
9	Kota Tual	3,855,784,618	1,865,268,952	5,721,053,570
10	Kab. Maluku Barat Daya	3,855,784,618	2,810,208,889	6,665,993,507
11	Kab. Buru Selatan	3,855,784,618	2,494,616,271	6,350,400,889
<b>XXXI</b>	<b>Provinsi Maluku Utara</b>			
1	Kab. Halmahera Tengah	3,855,784,618	2,391,633,028	6,247,417,646
2	Kab. Halmahera Barat	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kota Ternate	3,855,784,618	1,586,443,441	5,442,228,059
4	Kab. Halmahera Timur	3,855,784,618		3,855,784,618
5	Kota Tidore Kepulauan	3,855,784,618	2,107,127,191	5,962,911,809
6	Kab. Kepulauan Sula	3,855,784,618	1,969,753,518	5,825,538,136
7	Kab. Halmahera Selatan	3,855,784,618	2,066,789,112	5,922,573,730
8	Kab. Halmahera Utara	3,855,784,618		3,855,784,618
9	Kab. Pulau Morotai	3,855,784,618	2,018,639,625	5,874,424,243
<b>XXXII</b>	<b>Provinsi Papua</b>			
1	Kab. Biak Numfor	3,855,784,618	2,393,847,769	6,249,632,387
2	Kab. Jayapura	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Jayawijaya	3,855,784,618		3,855,784,618
4	Kab. Merauke	3,855,784,618		3,855,784,618
5	Kab. Mimika	3,855,784,618	4,077,564,584	7,933,349,202
6	Kab. Nabire	3,855,784,618	3,090,949,992	6,946,734,610
7	Kab. Paniai	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Puncak Jaya	3,855,784,618	2,848,532,150	6,704,316,768
9	Kab. Kepulauan Yapen	3,855,784,618	2,575,362,674	6,431,147,292
10	Kota Jayapura	3,855,784,618	1,904,849,030	5,760,633,648
11	Kab. Sarmi	3,855,784,618		3,855,784,618
12	Kab. Keerom	3,855,784,618		3,855,784,618
13	Kab. Yahukimo	3,855,784,618	3,677,128,843	7,532,913,461
14	Kab. Pegunungan Bintang	3,855,784,618	3,384,078,621	7,239,863,239
15	Kab. Tolikara	3,855,784,618		3,855,784,618
16	Kab. Boven Digoel	3,855,784,618		3,855,784,618
17	Kab. Mappi	3,855,784,618		3,855,784,618
18	Kab. Asmat	3,855,784,618	4,031,074,841	7,886,859,459
19	Kab. Waropen	3,855,784,618	2,658,080,442	6,513,865,060
20	Kab. Supiori	3,855,784,618		3,855,784,618
21	Kab. Mamberamo Raya	3,855,784,618	3,809,067,461	7,664,852,079
22	Kab. Mamberamo Tengah	3,855,784,618		3,855,784,618
23	Kab. Yalimo	3,855,784,618		3,855,784,618
24	Kab. Lanny Jaya	3,855,784,618		3,855,784,618
25	Kab. Nduga	3,855,784,618		3,855,784,618
26	Kab. Puncak	3,855,784,618		3,855,784,618
27	Kab. Dogiyai	3,855,784,618	2,637,300,352	6,493,084,970
28	Kab. Intan Jaya	3,855,784,618		3,855,784,618
29	Kab. Deiyai	3,855,784,618		3,855,784,618
<b>XXXIII</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>			
1	Kab. Sorong	3,855,784,618		3,855,784,618
2	Kab. Manokwari	3,855,784,618		3,855,784,618
3	Kab. Fak Fak	3,855,784,618	2,860,461,318	6,716,245,936
4	Kota Sorong	3,855,784,618	1,890,431,772	5,746,216,390

6/3



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-10

NO	DAERAH	PBB BAGI RATA	INSENTIF PBB	JUMLAH
5	Kab. Sorong Selatan	3,855,784,618		3,855,784,618
6	Kab. Raja Ampat	3,855,784,618		3,855,784,618
7	Kab. Teluk Bintuni	3,855,784,618		3,855,784,618
8	Kab. Teluk Wondama	3,855,784,618		3,855,784,618
9	Kab. Kaimana	3,855,784,618	3,314,162,925	7,169,947,543
10	Kab. Tambrauw	3,855,784,618		3,855,784,618
11	Kab. Maybrat	3,855,784,618		3,855,784,618
	<b>Total</b>	<b>1,893,745,354,618</b>	<b>1,019,709,037,105</b>	<b>2,913,454,391,723</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

MS